

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi semakin memudahkan berbagai kegiatan dan aktivitas di dunia bisnis. Perkembangan yang pesat mengakibatkan perusahaan harus terus memaksimalkan peluang yang dapat meningkatkan minat investor dalam berinvestasi dan memperluas pertumbuhan perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan salah satu hal utama yang dijadikan pertimbangan bagi para investor sebelum menanamkan modalnya dalam perusahaan. Pengukuran kinerja menurut Nelly et al. (1995) dalam Matari et al (2014) adalah sebuah proses dalam mengukur efisiensi dan efektifitas suatu tindakan. Pengukuran kinerja dapat memberikan informasi yang bernilai signifikan terhadap manajemen dalam melakukan pengawasan kinerja, *report progress*, meningkatkan motivasi dan komunikasi, dan mengatasi inti masalah. (Waggoner et al., 1999 dalam Matari et al., 2014). Pengukuran kinerja dalam perusahaan pada umumnya menggunakan rasio-rasio keuangan diantaranya *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Tobin-Q*, *Profit Margin (PM)*, *Earning per Share (EPS)*, dan rasio keuangan lainnya.

Kinerja yang optimal dapat dicapai dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal sebagai *Good Corporate Governance*. *Corporate governance* atau yang disebut juga sebagai tata kelola perusahaan merupakan aspek dinamis dan penting dalam berjalannya sebuah perusahaan. Dalam beberapa

tahun terakhir, *corporate governance* telah menjadi isu yang sering dibahas dalam sebuah penelitian ekonomi. Hal ini berawal dari terungkapnya skandal akuntansi perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom pada tahun 2001, dan diikuti oleh krisis ekonomi lainnya yang berkelanjutan. Akibatnya, kerugian yang besar harus ditanggung oleh para investor dan stakeholder. Penyebab utama dari krisis yang terjadi tersebut diduga karena buruknya tata kelola perusahaan pada saat itu.

Pentingnya penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) semakin disadari oleh pemerintah dan perusahaan. Menurut Abbaszadeh dan Taebi (2014), mekanisme tata kelola perusahaan yang efisien dapat meningkatkan performa perusahaan di pasar modal. Konsep dari *corporate governance* telah diakui oleh para peneliti dan manajer karena pengaruhnya terhadap metode pengambilan keputusan yang penting dan metode manajemen di dalam organisasi.

Leverage adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang (Brigham dan Houston, 2010). Berdasarkan penelitian terdahulu (Miller, 1997; Myers, 1948; Sheel, 1994 dalam Ahmad, Shamsi, dan Salman, 2015) *financial leverage* menyebabkan *cost of capital* dan meningkatkan profitabilitas serta harga saham.

Menurut Kazmi (2002) dalam Abbasi dan Malik (2015), keberadaan *growth* bukanlah demi kepentingan pertumbuhan tetapi *growth* adalah faktor yang tidak bisa dipisahkan dari siklus organisasi. Perusahaan harus terus bertumbuh untuk mendukung posisinya yang kompetitif, terutama jika perusahaan kompetitor memiliki langkah pertumbuhan yang lebih cepat. Perusahaan juga menginginkan

terjadinya pertumbuhan (*growth*) yang dapat menggambarkan proses kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan perusahaan juga telah dilakukan penelitiannya baik secara teoritis maupun empiris. Penelitian terkait dengan *corporate governance*, *leverage* dan *growth* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Ahmed dan Hamdan (2015) mengemukakan hasil empiris penelitiannya dan menyatakan bahwa tata kelola perusahaan secara signifikan berkorelasi dengan ROE dan ROA sebagai ukuran kinerja perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh Danoshana dan Ravivathani (2013) yang menyatakan bahwa praktik *corporate governance* dengan indikator jumlah direktur dan komite audit memiliki hubungan positif signifikan dengan kinerja perusahaan.

Makki dan Lodhi (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung antara *corporate governance* dengan kinerja keuangan perusahaan. Guo dan Kumara (2012) melakukan penelitian serupa untuk menguji hubungan antara kinerja dan tata kelola perusahaan di Srilanka. Penelitian yang dilakukan oleh Gull (2013) menghasilkan adanya hubungan positif antara mekanisme *corporate governance* secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan antara *leverage* dan kinerja dilakukan oleh Qamar et al. (2016) dan menghasilkan adanya hubungan negatif antara *leverage* dan *performance* dengan perusahaan berukuran besar maupun perusahaan berukuran kecil. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pendapat dari Gill dan Mathur (2011) dengan penelitiannya yang menghasilkan adanya hubungan positif antara *leverage* dan kinerja. Penelitian terkait dengan *growth* dilakukan oleh

Kouser et al (2012), dimana penelitian tersebut menghasilkan pernyataan terdapat hubungan positif antara *growth* dan kinerja. Pendapat serupa dikemukakan oleh Alghusin (2015) yang melakukan penelitian mengenai *size*, *leverage*, dan *growth* terhadap ROA.

Niresh dan Velnampy (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *return on asset*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return on asset. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Alghushin (2015), menghasilkan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *return on asset* tetapi tidak signifikan.

Telah banyak penelitian yang menguji pengaruh antara *corporate governance*, *leverage*, maupun *growth* terhadap kinerja perusahaan. Namun, penelitian yang menggunakan variabel moderasi terhadap variabel – variabel independen tersebut secara bersamaan masih belum ditemukan di Indonesia. Padahal penggunaan variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antar variabel. Hal tersebut memotivasi penulis dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memilih ukuran perusahaan (*firm size*) sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan diindikasikan dapat menentukan seberapa luas kegiatan operasional dan pengaruhnya terhadap hubungan antara *corporate governance*, *leverage*, dan *growth* dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, DAN GROWTH TERHADAP FIRM PERFORMANCE DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan *growth* terhadap kinerja perusahaan namun masih belum ditemukan penelitian yang menggabungkan ketiga variabel tersebut dan menggunakan variabel moderasi. *Corporate governance* pada penelitian ini menggunakan indikator jumlah direktur, proporsi komisaris independen, dan jumlah komite audit, dan juga terdapat *leverage* serta *growth* sebagai variabel independen, serta ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan *growth* terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut pada tahun 2013 sampai 2015. Ruang lingkup penelitian pada skripsi ini akan menekankan pada penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi mengingat asosiasi antara *corporate governance*, *leverage*, dan *growth* terhadap kinerja perusahaan telah banyak diuji sebelumnya. Variabel moderasi menjadi fenomena baru yang dapat memberikan *value* khususnya dalam penelitian ini, yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

D. Perumusan Masalah

Untuk memahami peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh antara *corporate governance* dengan indikator jumlah direktur, jumlah komite audit, dan proporsi komisaris independen, *leverage*, serta *growth* terhadap kinerja perusahaan, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh jumlah direktur terhadap kinerja perusahaan.
2. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komite audit independen terhadap kinerja perusahaan.
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap kinerja perusahaan.
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *growth* terhadap kinerja perusahaan.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh jumlah direktur terhadap kinerja perusahaan.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.

- c. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan.
- d. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap kinerja perusahaan.
- e. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *growth* terhadap kinerja perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari:

a. Manfaat bagi pengembangan ilmu:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu kepada para penggunanya mengenai peranan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi dari *corporate governance*, *leverage*, dan *growth* serta pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan bagi ilmu akuntansi.

b. Manfaat operasional:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola perusahaan dan pihak terkait dengan makalah yang diteliti, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melaksanakan penelitian sejenis.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada pembaca. Dengan sistematika ini pembaca dapat

mengetahui materi dan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan diharapkan pembahasan selanjutnya tidak menyimpang dari sistemika ini.

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

Bab ini membahas tentang uraian teori mengenai *agency theory*, *trade-off theory*, *pecking order theory*, *corporate governance*, dewan direksi dan direktur, komite audit, komisaris independen, *leverage*, *growth*, ukuran perusahaan, kinerja, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang digunakan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi meliputi pemilihan objek penelitian, metode penarikan sampel, teknik pengolahan data, serta teknik pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang analisis mengenai peranan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam pengaruhnya atas variabel bebas (*independent variable*) yaitu jumlah direktur, komite audit, proporsi komisaris independen, *leverage*, dan *growth* terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu *return on asset* yang diuji dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa atas nama prinsipal termasuk mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Eisenhardt (1989) menyatakan ada tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu:

a. Asumsi tentang sifat manusia

Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), lalu manusia selalu menghindari risiko (*risk adverse*)

b. Asumsi tentang keorganisasian

Dalam suatu organisasi terdapat konflik antar anggota organisasi dan efisiensi sebagai kriteria produktivitas, serta asimetri informasi antara pihak manajer dan pemilik

c. Asumsi tentang informasi

Informasi dipandang oleh perusahaan sebagai komoditas yang diperjualbelikan sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi.

Dalam suatu hubungan keagenan dapat timbul masalah yang disebabkan oleh para agen yang tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan utama dari prinsipal. Masalah yang akan timbul akibat hubungan keagenan adalah:

- a. Terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik
- b. Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Kemudian akan muncul yang disebut sebagai *agency cost* yaitu biaya yang timbul untuk mengurangi atau mengatasi masalah keagenan dimana didalamnya termasuk:

- a. *Monitoring cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh prinsipal untuk mengawasi, memantau, dan mengontrol perilaku agen.
- b. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.
- c. *Residual loss* merupakan pengorbanan atas berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari pengambilan keputusan agen yang tidak konsisten dengan peningkatan kemakmuran prinsipal. Biaya ini dianggap sebagai biaya yang timbul dari hubungan keagenan dan dinamakan biaya kerugian residual.

2. *Trade-off Theory*

Trade-off theory (Myers, 2001) memiliki pengertian perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan hutang sama dengan biaya kebangkrutan (*financial distress*). *Trade-off theory* muncul karena penggabungan teori Modigliani-Miller yang memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya agensi. Hal ini menyebabkan timbulnya *trade-off* antara penghematan pajak dari utang dan biaya kebangkrutan. Dengan adanya peningkatan hutang, maka akan ada beban bunga dari hutang yang nantinya akan mengurangi pajak perusahaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa biaya kebangkrutan (*financial distress*) juga akan semakin meningkat.

Menurut Brigham dan Houston (2011:188), metode ini memberikan tiga hal penting mengenai hutang yaitu:

- a. Perusahaan yang memiliki risiko bisnis tinggi sebaiknya menggunakan hutang yang sedikit, karena semakin besar probabilitas kesulitan keuangan akan memperbesar biaya kesulitan keuangan.
- b. Perusahaan yang memiliki aktiva berwujud (*tangible asset*) dapat menggunakan hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aktiva tak berwujud (*intangible asset*).
- c. Perusahaan yang sedang membayar pajak yang tinggi dapat menggunakan hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajaknya rendah.

Trade-off theory dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan (*agency costs*) dan biaya kebangkrutan (*financial distress*) tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan *asymmetric information* sebagai manfaat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak (*tax shields*) mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kebangkrutan. *Trade-off theory* mengimplikasikan bahwa manajer akan berpikir mengenai kerangka *trade-off* antara *tax shields* dan *financial distress* dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak.

3. *Pecking Order Theory*

Pendekatan ini dikemukakan oleh Myers dan Majluf tahun 1984 yang berpandangan bahwa pemilihan struktur modal mengikuti *pecking order theory*. Menurut Myers (1984), *pecking order theory* menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang berlimpah.

Dalam *pecking order theory* ini tidak terdapat struktur modal yang optimal. Secara spesifik perusahaan mempunyai urutan preferensi (hierarki) dalam penggunaan dana. Secara ringkas teori *pecking order* menyatakan sebagai berikut:

- a. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal.

- b. Perusahaan akan berusaha menyesuaikan rasio pembagian dividen dengan kesempatan investasi yang dihadapi, dan berupaya untuk tidak melakukan perubahan pembayaran dividen yang terlalu besar.
- c. Pembayaran dividen yang cenderung konstan dan fluktuasi laba yang diperoleh mengakibatkan dana internal kadang-kadang berlebih ataupun kurang untuk investasi.
- d. Apabila pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dulu. Penerbitan sekuritas akan dimulai dari penerbitan obligasi, kemudian obligasi yang dapat dikonversikan menjadi modal sendiri, baru akhirnya menerbitkan saham baru.

4. *Corporate Governance*

Corporate governance diakui sebagai salah satu implikasi paling penting dalam membangun kepercayaan pasar dan menarik investor positif dalam organisasi khusus dan ekonomi secara umum. Mempromosikan standar tata kelola perusahaan yang baik dianggap sangat penting dalam menarik modal investasi, mengurangi risiko dan mengembangkan kinerja perusahaan (Ahmed dan Hamdan, 2015).

Menurut Sohail et al (2013), *corporate governance* sangat penting untuk sebuah perusahaan hampir sama pentingnya dengan *business plan* utamanya. Jika dijalankan secara efektif, *corporate governance* dapat mencegah skandal perusahaan, mencegah terjadinya *fraud* dan tanggung jawab pidana dari perusahaan. Ini juga meningkatkan citra perusahaan di mata publik sebagai

perusahaan dengan kebijakan sendiri yang bertanggung jawab dan layak bagi *shareholders* dan *debt holder capital*. Dengan mengadopsi praktik *corporate governance* yang tepat dapat menghapus masalah keagenan yang dihadapi oleh pihak internal dan eksternal perusahaan.

Abbaszaded dan Taebi (2014) mendefinisikan *corporate governance* sebagai aturan, struktur, proses dan sistem yang mengarah untuk mencapai tujuan akuntabilitas, serta menghormati hak-hak para penerima manfaat oleh entitas. Mekanisme *corporate governance* yang efisien juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan di pasar modal.

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) menyatakan 4 (empat) prinsip dalam *corporate governance* meliputi :

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

b. Pertanggung-jawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* yaitu mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab.

c. Keterbukaan (*Transparency*)

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independent. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

d. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Dewan Direksi dan Direktur

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direktur. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001), terdapat dua sistem yang berbeda berhubungan dengan bentuk dewan di dalam suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang berbeda pula, yaitu:

- a. Sistem hukum *Anglo-Saxon* mempunyai Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*. Sistem yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan direktur. Dalam sistem ini, anggota dewan komisaris juga merangkap anggota direktur dan kedua dewan ini disebut *board of directors*. Negara-negara yang menerapkan sistem ini misalnya Amerika Serikat dan Inggris.
- b. Sistem hukum Kontinental Eropa mempunyai Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*. Sistem dimana dalam sebuah perusahaan memiliki dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (komisaris) dan dewan manajemen (direktur). Dalam sistem ini, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan

komisaris yang mewakili para pemegang saham untuk melakukan kontrol terhadap manajemen. Dewan komisaris membawahi secara langsung direktur dan mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan direktur serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direktur dalam menjalankan perusahaan. Negara-negara yang menggunakan *two tiers system* antara lain Denmark, Belanda, dan Jerman. Sistem ini juga diadopsi oleh hukum Indonesia karena sistem hukum Indonesia mengadopsi sistem hukum Belanda, yaitu *two tiers system* untuk struktur dewan dalam perusahaan. Namun, dalam penerapannya terdapat perbedaan antara *two tiers system* yang dipakai di Indonesia dan Belanda, termasuk dalam hak dan kewajiban dewan komisaris dimana dalam keadaan umum tidak termasuk kewenangannya dalam menunjuk atau memberhentikan direktur. Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU Perseroan Terbatas tahun 1995 yang menyatakan bahwa anggota direktur dan anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 80 ayat 1 dan pasal 91 ayat 1 & pasal 95 ayat 1 dan pasal 101 ayat 1). Dengan demikian, maka baik dewan komisaris maupun direktur bertanggung jawab terhadap RUPS atau kedudukannya sejajar.

6. Komite Audit

The Institute of Internal Auditors (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya Komite Audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga non-profit dan pemerintahan. Komite Audit

beranggotakan Komisaris Independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (*The Institute of Internal Auditors, Internal Auditing and the Audit Committee: Working Together Towards Common Goals*).

Forum for Corporate Governance in Indonesia(FCGI) (2001) menjabarkan 3 (tiga) tanggung jawab komite audit, yaitu laporan keuangan (*financial reporting*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan pengawasan perusahaan (*corporate control*). Kriteria dan catatan lainnya tentang komite audit berdasarkan FCGI adalah:

- a. Paling sedikit satu anggota komite audit harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keuangan dan akuntansi.
- b. Komite audit harus hadir pada RUPS untuk menjawab pertanyaan para pemegang saham.
- c. Komite audit harus mengundang eksekutif yang menurut mereka tepat (terutama pejabat di bidang keuangan) untuk hadir pada rapat-rapat komite, akan tetapi apabila dipandang perlu dapat mengadakan rapat tanpa kehadiran seorang pun eksekutif perusahaan. Di luar itu, Direktur Keuangan dan Satuan Kerja Audit Internal dan seorang wakil dari auditor eksternal harus hadir sebagai peserta pada rapat-rapat komite audit.
- d. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite audit.
- e. Wewenang komite audit meliputi:

- 1) Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- 2) Mencari informasi yang relevan dari tiap karyawan
- 3) Mengusahakan saran hukum dan saran profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
- 4) Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai, apabila dipandang perlu (Pratip Kar, 2000).

7. Komisaris Independen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah (DPS), yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan tugas monitoring agar tercipta perusahaan yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Peraturan Bursa Efek Jakarta mengenai komisaris independen terdapat dalam peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 yang mengemukakan bahwa perusahaan yang

terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Kriteria tentang komisaris independen berdasarkan FCGI (2001) adalah:

- a. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
- b. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
- c. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
- d. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.

- f. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
- g. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

8. *Leverage*

Rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur sejauh manaperusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang. *Financialleverage* yang besar dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan tetapi sebaliknya, jika terjadi resesi ekonomi, *financial leverage* akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. *Cash flow problem* akan terjadi dan perusahaan akan kesulitan membayar beban bunga kepada kreditur dikarenakan menurunnya *sales volume*. Leverage dapat diukur dengan *debt ratio*, yaitu *total debt* dibagi dengan *total asset* perusahaan. *Leverage* dapat menggambarkan struktur modal perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaanya(Ahmad, Shamsi, dan Salman, 2015).

9. *Growth*

Growth adalah sebuah proses bertahap dan dalam konteks perusahaan, *growth* dapat didefinisikan sebagai peningkatan penjualan, ekspansi bisnis melalui

akuisisi atau *merger*, pengembangan dan diferensifikasi produk, dan juga peningkatan jumlah karyawan perusahaan (Vijayakumar and Devi, 2011 dalam Kouser et al, 2012). Pengukuran *growth* yang lainnya dapat berupa peningkatan asset dan juga peningkatan cabang dari organisasi. Selamamenjadi perhatian, dapat dikatakan bahwa *growth* adalah *critical factor* bagi kesuksesan sebuah bisnis, selain itu *growth* telah menjadi sumber dari evolusi dan pembangunan ekonomi sebuah negara (Asimakopoulos, Samitas and Papadogonas, 2009 dalam Kouser et al, 2012). Menurut Kazmi (2002) dalam Abbasi dan Malik (2015), keberadaan *growth* bukanlah demi kepentingan pertumbuhan tetapi *growth* adalah faktor yang tidak bisa dipisahkan dari siklus organisasi. Perusahaan harus terus bertumbuh untuk mendukung posisinya yang kompetitif, terutama jika perusahaan kompetitor memiliki langkah pertumbuhan yang lebih cepat.

10. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai penentu besar atau kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-11/PM/1997 tanggal 30 April 1997, definisi perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), bukan merupakan afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah atau kecil, dan bukan merupakan reksa dana.

Menurut Niresh dan Velnampy (2014), ukuran perusahaan (*firm size*) adalah jumlah dan variasi dari kapasitas produksi dan kemampuan yang dimiliki sebuah

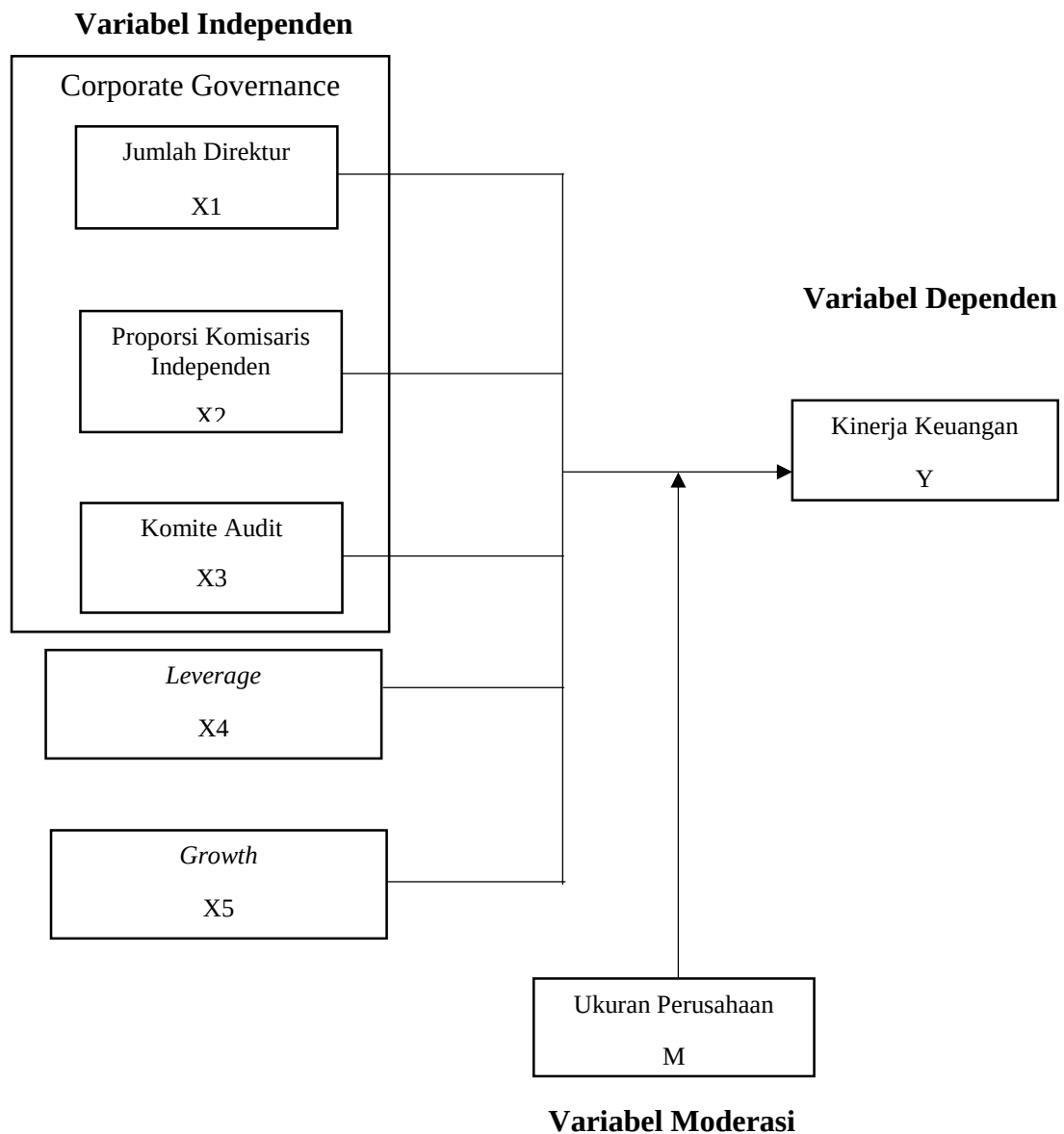
perusahaan atau jumlah dan variasi dari jasa yang dapat disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan. Berdasarkan konsep *economies of scale* yang dapat ditemukan dalam pendapat tradisional neo-klasik, ukuran perusahaan adalah faktor utama dalam menentukan profitabilitas perusahaan. Pendapat tersebut juga mengemukakan bahwa perusahaan besar dapat melakukan produksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil.

11. Kinerja

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara dan dengan mengaplikasikan berbagai metode. Metode yang secara umum digunakan untuk menganalisa keuangan adalah dengan menggunakan rasio profitabilitas sebagai pengukur keseluruhan efisiensi dan kinerja perusahaan (Niresih dan Velnampy, 2014). Kinerja adalah sebuah proses yang sedang atau telah tercapai yang dapat menjadi pengukur dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

B. Kerangka Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (*independent*), variabel terikat (*dependent*), dan variabel moderasi (*moderating*). Variabel *independent* dalam penelitian ini adalah *corporate governance* (dengan indikator jumlah direktur, jumlah komite audit, proporsi komisaris independen), *leverage*, dan *growth*. Variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah ROA dan variabel *moderating* berupa ukuran perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

C. Perumusan dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan kerangka penelitian, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

1. Jumlah Direktur (*Board Size*) dengan Kinerja Perusahaan.

Board Size atau jumlah direktur dapat diukur dengan menghitung banyaknya direktur yang terdapat dalam suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akpan dan Amran (2014), *board size* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sheikh, Wang, dan Khan (2013), dalam penelitiannya juga memberikan hasil serupa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sharma (2016), dan menghasilkan pengaruh negatif antara *board size* dengan kinerja perusahaan. Pendapat tersebut didukung oleh Vo dan Phan (2013), dan Danoshana dan Ravivathani (2013). Atas dasar uraian diatas, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh jumlah direktur terhadap kinerja perusahaan secara negatif.

2. Proporsi Komisaris Independen dengan Kinerja Perusahaan

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Proporsi komisaris independen diukur dengan menghitung jumlah komisaris independen dibagi dengan total komisaris perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan antara komisaris independen dengan kinerja perusahaan sebelumnya dilakukan oleh Hamdan dan Ahmed (2014) dan menyatakan adanya pengaruh positif signifikan antara komisaris independen dengan kinerja perusahaan. pendapat tersebut didukung oleh Kouki dan Guizani (2015) dengan penelitiannya yang menghasilkan pernyataan serupa.

Berbeda dengan peneliti di paragraf sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Gull (2013) menghasilkan hubungan negatif antara *non-executive director* dengan kinerja perusahaan. Pendapat yang sama juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Vo dan Phan (2013), Sharma (2016), Fauzi dan Locke (2012). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan secara negatif.

3. Komite Audit dengan Kinerja Perusahaan

Komite audit mempunyai berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Amba pada tahun 2012 menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja dan berkontribusi dalam transparansi dan pengauditan laporan keuangan dengan lebih baik meskipun variabel ini tidak signifikan secara statistik. Danoshana dan Ravivathani (2013) menyatakan bahwa komite audit memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Fauzi dan Locke (2012) juga memberikan hasil positif dan signifikan dari hubungan antara komite audit dan kinerja perusahaan. Menurut Fauzi dan Locke (2012), keberadaan komite audit meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi *agency cost*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

H₃: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan secara positif.

4. *Leverage* dengan Kinerja Perusahaan

Leverage adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang. *Leverage* diukur dengan *debt ratio*, yaitu *total debt* dibagi dengan *total asset* perusahaan. Penelitian mengenai leverage dan kinerja dilakukan oleh Ahmad, Shamsi, dan Salman (2015) dan menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara *financial leverage* dan *return on asset*. Pernyataan yang sama dihasilkan oleh Algushin (2015) yang menyatakan terdapat hubungan negatif antara *leverage* dengan profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Mathur pada tahun 2011 menghasilkan adanya hubungan positif antara *leverage* dengan *return on asset* pada perusahaan jasa di Kanada dan adanya hubungan negatif antara *leverage* dengan *return on asset* pada perusahaan manufaktur di Kanada. Hal ini menimbulkan kontradiksi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, Shamsi, dan Salman (2015) dan Algushin

H₄: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap kinerja perusahaan secara negatif.

5. *Growth* dengan Kinerja Perusahaan

Growth adalah sebuah proses bertahap dan dalam konteks perusahaan, *growth* dapat didefinisikan sebagai peningkatan penjualan, ekspansi bisnis melalui akuisisi atau *merger*, pengembangan dan diferensifikasi produk, dan juga peningkatan jumlah karyawan perusahaan. *Growth* perusahaan dapat diukur

dengan menghitung selisih *current asset* pada tahun ini (X) dengan tahun sebelumnya (X-1), kemudian dibagi dengan *current asset* tahun sebelumnya (X-1).

Kouser et al. (2016) menyatakan adanya hubungan positif antara *growth* dengan *return on asset*. Tetapi, penelitiannya juga menghasilkan adanya hubungan negatif antara *size* dan *return on asset*. Profitabilitas (dengan indikator ROA) tidak dipengaruhi secara signifikan oleh *size* tetapi *growth* memiliki pengaruh yang tinggi terhadap profitabilitas. Alghusin (2015) menghasilkan pendapat serupa mengenai hubungan *growth* dengan ROA, tetapi terdapat pendapat yang berbeda, dimana ROA memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

H₅: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *growth* terhadap kinerja perusahaan secara positif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah direktur, jumlah komite audit, dan proporsi komisaris independen sebagai indikator *corporate governance*, serta *leverage* dan *growth*. Variabel dependen dalam penelitian ini berupa kinerja perusahaan dengan indikator berupa *return on asset*. Variabel moderasi yang digunakan adalah ukuran perusahaan.

B. Metode Penarikan Sampel

1. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini akan diambil jumlah sampel sebanyak 144 perusahaan manufaktur yang akan terlokasi dalam periode 3 tahun secara berturut-turut, sehingga total sampel menjadi sebanyak 432 sampel. Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016).

Kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain:

- a. Perusahaan manufaktur yang telah menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit secara tiga tahun berturut-turut dan dengan periode yang berakhir pada bulan Desember selama tahun 2013-2015.
- b. Perusahaan manufaktur yang memiliki data keuangan lengkap untuk menghitung variabel-variabel dalam penelitian selama periode pengamatan.
- c. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.
- d. Perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan satuan mata uang rupiah.

2. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel, yaitu variabel dependen dengan lambang huruf X, variabel independen dengan lambang huruf Y, dan variabel moderasi dengan lambang huruf M.

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (tetap) (Sugiyono, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah direktur, proporsi komisaris independen, komite audit, *leverage*, dan *growth*. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dengan *return on asset* sebagai indikator.

Menurut Sugiyono (2016), variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel moderator yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*firm size*).

Variabel moderator menurut Sugiono (2004), dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan hubungan dimensi ada tidaknya hubungan interaksi antara variabel moderator dengan variabel prediktor (variabel independen) dan dimensi ada tidaknya hubungan antara variabel moderator dengan variabel kriteria (variabel dependen) sebagai yang tampak dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Jenis Variabel Moderasi

No	Hasil Uji	Jenis Moderasi
1.	b ₂ non significant b ₃ significant	Moderasi Murni (<i>Pure Moderator</i>)
2	b ₂ significant b ₃ significant	Moderasi Semu (<i>Quasi Moderator</i>). Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.
3.	b ₂ significant b ₃ non significant	Prediktor Moderasi (<i>Predictor Moderasi Variabel</i>). Artinya variabel moderasi ini hanya berperanan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk
4.	b ₂ non significant b ₃ non significant	Moderasi Potensial (<i>Homologiser Moderator</i>). Artinya variabel tersebut potensial menjadi variabel moderasi.

Sumber: Sugiono, 2004

Berikut adalah penjabaran operasionalisasi variabel dalam bentuk tabulasi:

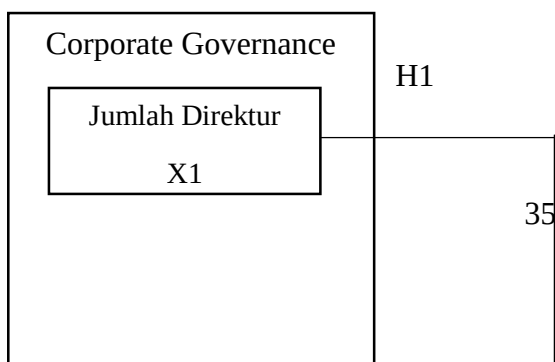
Tabel 3.2

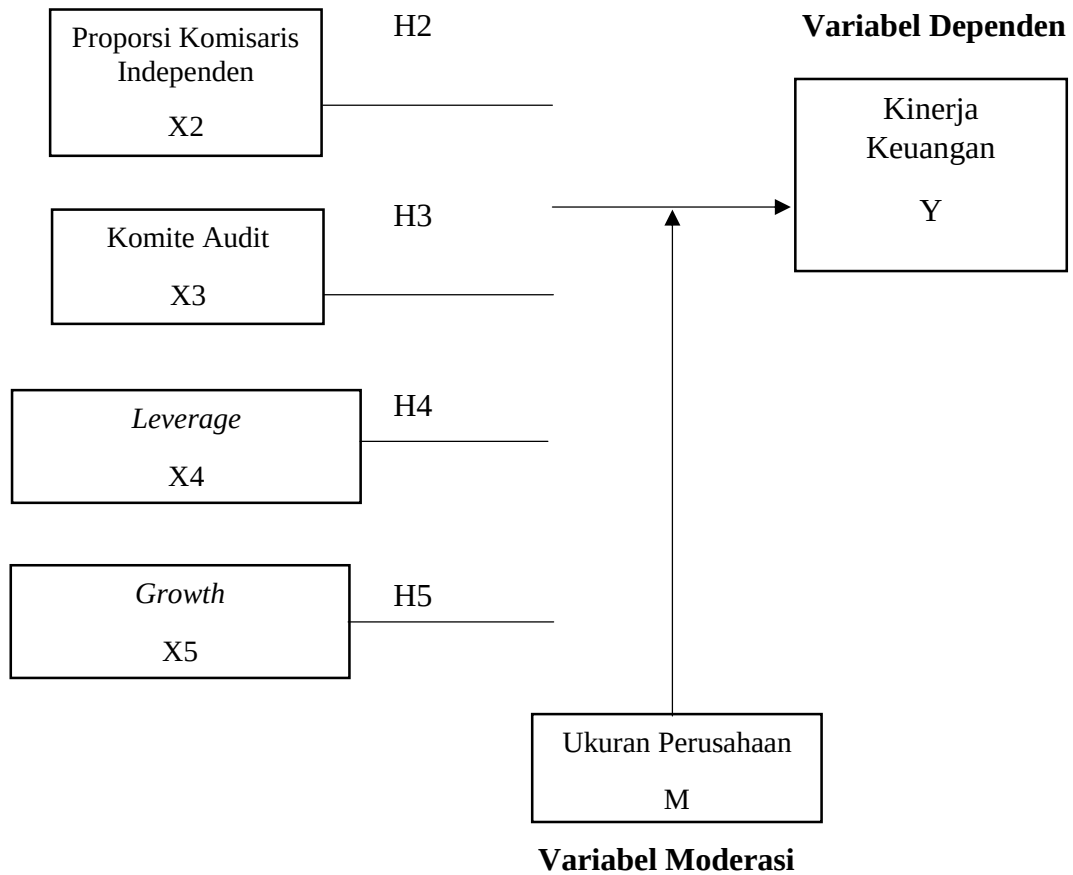
Operasionalisasi Variabel

No.	Jenis Variabel	Variabel Penelitian	Rumusan Pengukuran	Sumber
1.	Dependen (Y)	<i>Return on Asset</i>	Laba Bersih /Total Asset	Ahmad, Shamsi, dan Salman (2015)
2.	Independen (X1)	Jumlah Direktur	Jumlah Direktur	Abbaszaded dan Taebi, (2014)
3.	Independen (X2)	Proporsi Komisaris Independen	Jumlah Komisaris Independen / Total Komisaris	Akpan dan Amran(2014)
4.	Independen (X3)	Komite Audit	Jumlah Komite Audit	Danoshana dan Ravivathani(2012)
5.	Independen (X4)	<i>Leverage</i>	<i>Total Debt / Total Asset</i>	Gill dan Mathur (2011)
6.	Independen (X5)	<i>Growth</i>	<i>(Current year assets - Previous year assets)/ Previous year Asset</i>	Abbasi dan Malik (2015)
7.	Moderasi (M)	Ukuran Perusahaan	<i>ln(total asset)</i>	Abbaszaded dan Taebi (2014)

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Independen





Gambar 3.1

Model Penelitian

H₁: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh jumlah direktur terhadap kinerja perusahaan secara negatif.

H₂: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan secara negatif.

H₃: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan secara positif.

H₄: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap kinerja perusahaan secara negatif.

H₅: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *growth* terhadap kinerja perusahaan secara positif.

C. Teknik dan Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan dalam teknik pengumpulan data. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data keuangan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk memperoleh data sekunder, berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur pada tahun 2013-2015, yang dapat diperoleh dari *website* www.idx.co.id dan *website* perusahaan terkait. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, dan majalah ekonomi yang terkait dengan topik penelitian.

D. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA). Peneliti menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) karena terdapat variabel moderasi. Pengujian ini menggunakan bantuan program aplikasi komputer statistik yaitu SPSS.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewnes (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). Analisis ini akan memudahkan dalam memahami data yang digunakan dalam penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan sebelum model regresi digunakan dalam menguji hipotesis dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorof-Smirnov (K-S). Data berdistribusi normal jika probabilitas *asympt.sig (2-tailed)* $> 0,05$.

Jika data tidak terdistribusi normal, maka dapat dilakukan transformasi data agar menjadi terdistribusi normal. Untuk menormalkan data, harus diketahui terlebih dahulu bagaimana bentuk grafik histogram dari data. Berikut adalah tabel grafik histogram beserta bentuk transformasi datanya:

Tabel 3.3

Bentuk Transformasi Data

No	Bentuk Grafik Histogram	Bentuk tranformasi
1.	Moderate positive skewness	SQRT (x)
2.	Substantial positive skewness	Log 10 (x) atau logaritma 10 atau LN
3.	Severe positive skewness dengan bentuk L	1/x atau inverse
4	Moderate negative skewness	SQRT (k-x)
5	Substansial negative skewness	Log 10 (k-x)
6	Severe negative skewness dengan bentuk L	1/(k-x)

k= Nilai tertinggi (maksimum) dari data mentah X

Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2016). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 . Jika nilai *tolerance* > 0.10 atau VIF < 10 dikatakan tidak ada multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 atau periode sebelumnya (Ghozali, 2016). Autokorelasi

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW Test). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson adalah sebagai berikut (Ghozali 2016):

Tabel 3.4

Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson (DW)

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dL < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak di tolak	$dU < d < 4 - dU$

Sumber : Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dengan grafik Scatterplot dianggap dapat menimbulkan hasil yang subjektif, karena output yang dihasilkan berupa grafik dan penafsiran tiap orang akan berbeda-beda atas grafik tersebut, sehingga dalam penelitian ini digunakan uji *Park*

E. Uji Hipotesis

1. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi kuat tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2007) dalam Priyatno (2016), jika nilai koefisien korelasi mendekati 1 atau -1 maka hubungan semakin kuat, jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 3.5

Intepretasi Koefisien Korelasi

Rentang Nilai Korelasi	Keputusan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Priyatno, 2007

2. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menurut Ghozali (2016), digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel independen akan mampu menjelaskan variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, apabila $R^2=0$ berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan bila $R^2=1$ berarti hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sempurna.

Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari dua, maka digunakan *adjusted* R^2 sebagai koefisien determinasi. Dalam penelitian ini digunakan nilai *adjusted* R^2 , karena terdapat lebih dari dua variabel independen. Hal ini dilakukan untuk menghindari nilai R^2 yang bias akibat banyaknya variabel independen dalam persamaan regresi.

3. Uji F

Menurut Ghazali (2016), Uji statistik F atau uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependensekaligus melihat *goodness of fit* dari model yang digunakan penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi tingkat 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka model tidak fit. Namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka model fit untuk digunakan dalam penelitian ini.

4. Uji t

Menurut Ghozali (2016), Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis tidak ditolak.
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

5. *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *moderated regression analysis*. *Moderated regression analysis* adalah pendekatan analitis yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, terdapat dua persamaan regresi yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$
2. $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 M + \beta_7 X_1 * M + \beta_8 X_2 * M + \beta_9 X_3 * M + \beta_{10} X_4 * M + \beta_{11} X_5 * M + \epsilon$

Dimana:

Y = Return on asset

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_{11}$ = *Slope coefficient*

X1 = Jumlah Direktur

X2 = Proporsi Komisaris Independen

X3 = Komite Audit

X4 = *Leverage*
X5 = *Growth*
M = Ukuran Perusahaan
 ε = Error